

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Penelitian

Persaingan dunia semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, masing-masing KAP harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin. Tetapi KAP tersebut juga harus memperhatikan kualitas kinerjanya, sehingga selain dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, kantor tersebut juga dapat semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Jika independensi akuntan publik terus diperhatikan bahkan ditingkatkan oleh KAP, maka jasa yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi. (Putra, 2013 dalam Muhammad Rifki, 2017)

Jasa audit laporan keuangan yang disediakan oleh berbagai KAP dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dalam memberikan jaminan atas wajarnya sebuah laporan keuangan. Jika suatu laporan keuangan dinilai wajar, maka akan memudahkan suatu perusahaan untuk mendatangkan investor guna mengembangkan perusahaan tersebut, terutama jika perusahaan tersebut bersifat terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (S.Tusadiah, 2016)

Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit perusahaan

(Arens et al.,1996). Independensi menjadi syarat utama bagi seorang auditor dalam memberikan jasa audit dan memberikan opini yang dapat dipercaya. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor : *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil. (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*, 2006 dalam Daud M.T.Sinaga, 2012)

Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis seorang auditor jika ia kehilangan sikap tidak memihak, maka ia tidak mempertahankan kebebasan pendapatnya. (Dalam buku Standar Profesional Akuntan ,2001 seksi 220 PSA No.4 Alinea ke 02 dalam Daud M.T.Sinaga, 2012)

Semakin memburuknya independensi akuntan publik akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan independensi pihak auditor (akuntan publik) sebagai pemeriksa laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal menyangkut dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan terancam oleh berbagai hal dan berperilaku secara

tidak profesional. (Bazerman *et al.* 1997 dalam RS Prakoso, 2007 dalam Daud M.T.Sinaga, 2012)

Kasus yang paling fenomenal mengenai pembuat keputusan tanpa memperhatikan kode etik profesi yang pernah terjadi di dunia adalah kasus penipuan data laporan keuangan pada PT.Enron dan KAP Arthur Andersen. PT.Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (Penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985, bisnis inti PT.Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi *Future transaction*, *Trading commodity non energy* dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus PT.Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus bergelinding sampai tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai Bursa Efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa sampai ke Asia. PT.Enron merupakan suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US\$ 31.2 milyar. Dalam kasus PT.Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap

diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron (*debacle*), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Board of Director* (dewan direktur, direktur eksekutif dan direktur non eksekutif) membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (*insider trading*), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik.
2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan *outsourcing* secara total atas fungsi internal audit perusahaan.
 - a. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan.
 - b. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen.
 - c. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen.
3. Pada awal tahun 2001 patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen.

(Uwi 2009. www.wordpress.com akses 14 November 2009)

Fenomena yang terjadi pada kasus pelanggaran sikap independensi telah dilakukan juga oleh seorang akuntan publik yaitu Justinus Aditya Sidharta yang terjadi pada PT.Great River Internasional,Tbk. di mana ia telah melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan, kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan *Account* penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT.Great River tahun 2003. PT Great River International Tbk pada kasusnya tidak berlaku adil dan memihak kepada salah satu auditor yang bekerja pada perusahaannya. PT Great River melakukan kecurangan dengan melakukan perencanaan bersama auditornya untuk memberikan keuntungan terhadap mereka. Justinus selaku auditor mengakui bahwa hal yang dilakukannya ini adalah hal yang disadarinya dan disengaja karena ingin menambahkan nominal di beberapa aset untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan, sebab katanya saldo laba bersih

tidak berbeda dengan yang diterima perusahaan. (Ifanmaulana www.coursehero.com, akses 5 Juli 2013)

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap indenpendensi auditor masih menjadi masalah utama bagi KAP yang harus ditangani demi peningkatan kualitas audit yang dihasilkan. Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang tidak dipatuhi oleh auditor sehingga menyebabkan terjadinya sikap auditor yang tidak independen ketika melaksanakan pelaksanaan audit pada perusahaan.

Auditor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengaudit laporan keuangan dan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, sehingga ia mampu melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang kemudian sebagai balasan atas jasanya akan mendapatkan *Fee* atau imbalan yang sesuai atas jasa profesional yang telah ia berikan kepada klien. (Yuliana, 2014)

Audit Fee sendiri diartikan sebagai besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan jasa audit. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi KAP yang bersangkutan (Al Shammari et al, 2008). Selain itu, Iskak dan Michell Suharli, 2008 dalam Emma Yuliana, 2014) mengatakan bahwa *Audit Fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *Audit Fee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan.

Independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman yang berpengaruh adalah *audit tenure* yang panjang. Dia berpendapat bahwa *Audit Tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan yang lebih nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit Tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini. (Flint, 1988 dalam Nasser *et al.* 2006 dalam Martina Putri Wijayanti, 2010)

Auditor diharapkan dapat membatasi adanya praktik manajemen laba dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan keuangan. Namun demikian, kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba tanpa adanya kecurangan dengan klien tergantung pada independensi auditor tersebut.

Empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu : 1). Kantor Internasional empat besar, Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut Kantor Akuntan Publik Internasional “Empat Besar”. Keempat kantor ini memiliki cabang diseluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor empat besar mengaudit hamper semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga, 2). Kantor

Nasional, Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor-kantor ini besar tetapi jauh lebih kecil daripada empat besar. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti empat besar dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional. 3). Kantor Regional dan Kantor Lokal Besar, Terdapat kurang dai 200 KAP yang memiliki taraf professional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jarak yang tidak begitu jauh. KAP lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh. Kantor regional yang terbesar tidak jauh lebih kecil dari ketiga kantor nasional. Kantor regional dan kantor local yang besar bersaing mendapatkan klien dengan KAP lainnya, termasuk kantor nasional dan empat besar. 4). Kantor Lokal kecil, Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 tenaga professional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan public. Banyak kantor local kecil tidak melakukan audit terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya. (canyapramesthirm.blogspot.com 2015). Hubungan dengan kedudukan KAP di Indonesia bahwa KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *non big four*, yaitu KAP asing *non big four* yang membuka KAP cabang di Indonesia atau

KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing *non big four*, yakni *Kreston International*, *PKF International*, dan sebagainya. (Dalam Buku Direktori IAI, 2011 dalam Muhammad Rifki, 2017),

Adanya hubungan positif antara independensi auditor dan ukuran KAP berdasarkan dua hal, yaitu KAP *big four* dan *non big four*. KAP *big four* dianggap memiliki independensi auditor yang lebih bagus dibandingkan KAP *non big four*, karena KAP *big four* mempunyai insentif yang lebih besar untuk mengaudit lebih akurat. KAP *big four* memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien dan memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan KAP *non big four*. Selain itu karena KAP *big four* lebih dipercaya masyarakat dan dianggap mampu untuk membatasi adanya praktik manajemen laba. KAP *big four* dan *non big four* akan terancam tuntutan hukum apabila mereka tidak menghasilkan laporan audit yang tidak akurat (Muid, 2012 dalam Novia Ayu Lestari, Surakarta, 2014)

Berdasarkan uraian di atas, melihat sangat pentingnya independensi bagi seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Audit Fee* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana *Audit Tenure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Audit Fee* terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian dan melakukan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Audit Fee* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Audit Tenure* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Ukuran Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Fee* terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Tenure* terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pasundan Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, masyarakat maupun perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat berguna bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan *Audit Fee*, *Audit Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Independensi Auditor. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure* dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Independensi Auditor.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 (Strata-1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi manajemen dalam *Audit Fee*, *Audit Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Independensi Auditor yang baik dan benar.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam hal *Audit Fee*, *Audit Tenure*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Independensi Auditor serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dalam masalah bahasan skripsi ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai.